

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP 2018

Dinas Sosial Kabupaten Bone



Hapuskan Perbedaan



dengan kebebasan
BERKARYA

БЕРКВБЛ
ꦧꦺꦫꦏꦂꦪ



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategi, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisis, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Bone pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 8 (*delapan*) indikator kinerja utama, terdapat 4 (*empat*) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Sosial

Kabupaten Bone Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Watampone, 2 Februari 2018

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Bone



Drs. RUSLAN, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bone LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat Dinas Sosial Kabupaten Bone disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone

Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Bone tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Bone

Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan dekonsentrasi dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.

b. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Sosial dan kebijakan Bupati;

- b. perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengoordinasian, pengarahan, pembimbingan dan pembinaan staf dalam pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- e. pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengendalian dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

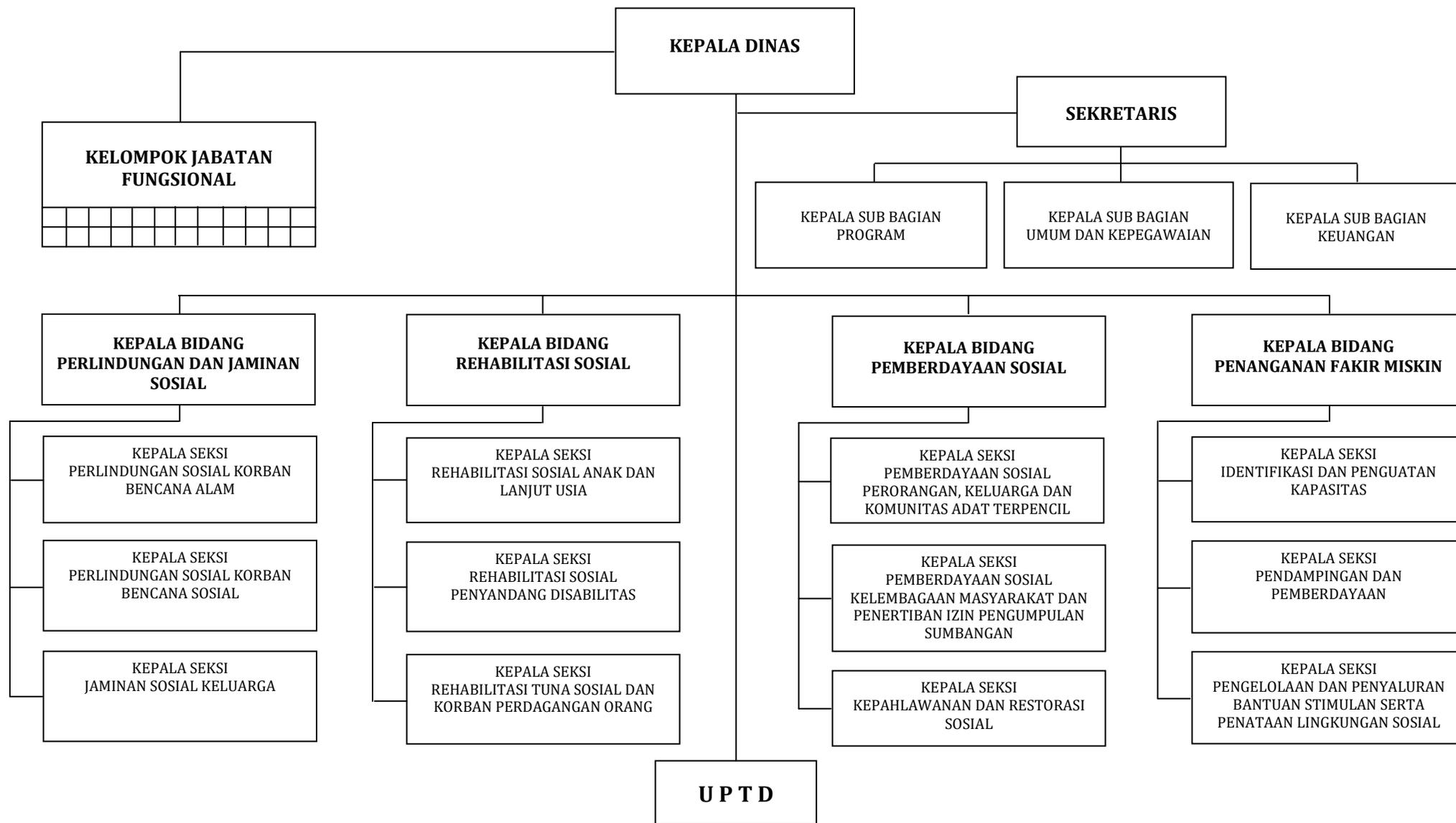
c. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Bone memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. kepala dinas
- b. sekretariat dinas terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. bidang perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- d. bidang rehabilitasi sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- e. bidang pemberdayaan sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan
 - 3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- f. bidang penanganan fakir miskin terdiri dari :
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - 2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial
- g. UPTD
- h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone



- d. Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagai berikut :

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan di Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Jumlah Pegawai sebanyak 42 orang yang terdiri dari :

- Laki-laki = 24 Orang
- Perempuan = 18 Orang
- Jumlah = 42 Orang

2. Golongan

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = 11 Orang
- Golongan III = 22 Orang
- Golongan IV = 9 Orang
- Jumlah = 42 Orang

3. Tingkat Pendidikan

- SLTP = - Orang
- SLTA = 16 Orang
- Diploma 3 (D3/
Sarjana Muda = 2 Orang
- Strata 1 (S1) = 18 Orang
- Strata 2 (S2) = 6 Orang
- Jumlah = 42 Orang

4. Jabatan

- Struktural
 - Eselon II.a = - Orang
 - Eselon II.b = 1 Orang
 - Eselon III.a = 1 Orang
 - Eselon III.b = 4 Orang
 - Eselon IV.a = 14 Orang
 - Eselon IV.b = - Orang
 - Jumlah = 20 Orang

➤ Fungsional : - Orang

b. Tenaga Honorer berjumlah 28 Orang terdiri dari :

1) SK Bupati

➤ Laki-laki = 4 Orang

➤ Perempuan = 4 Orang

Jumlah = 8 Orang

2) SK. Kepala Dinas

➤ Laki-laki = 13 Orang

➤ Perempuan = 7 Orang

Jumlah = 20 Orang

Selain itu, pada Dinas Sosial Kabupaten Bone telah menerima Program Nasional melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni Program Keluarga Harapan (PKH) di 27 kecamatan di Kabupaten Bone yang mulai efektif berjalan sejak tahun 2010 sehingga diadakan perekrutan tenaga pendamping dan tenaga operator dengan rincian masing-masing sebagai berikut.

1) Koordinator 2 Orang Laki-Laki

2) Supervisor 2 Orang Perempuan

3) Pendamping 113 Orang

Laki-Laki = 58 Orang

Perempuan = 55 Orang

4) Operator 8 Orang

Laki-Laki = 7 Orang

Perempuan = 1 Orang

Pada Dinas Sosial juga memiliki organisasi/lembaga sayap yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dapat membantu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial yang ada di daerah yang dikenal dengan nama PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha Kesejahteraan Sosial. Apabila peran PSKS yang ada dapat dioptimalkan, maka akan menjadi pionir dalam membantu Pemerintah dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

PSKS yang dimaksud meliputi :

1. Pekerja Sosial Profesional
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang Taruna (KT)
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Keluarga Pioner
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
12. Dunia Usaha

1.4 ISU STRATEGIS

Dari sekian banyak jenis pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah dibagi habis pada semua Bidang/Seksi Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone sebagaimana telah diuraikan pada poin terdahulu diatas, maka yang menjadi Isu Strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

- Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone seperti masalah Cacat Tubuh sebanyak 2.887 orang, Tuna Netra sebanyak 690 orang, Eks Nara Pidana sebanyak 351 orang dan Tuna Susila sebanyak 56 orang serta Eks Kusta Kronis sebanyak 555 orang.
- Akibat krisis multi dimensi menjadikan kebutuhan dasar melambung tinggi, dibarengi dengan era globalisasi yang menuntut setiap manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga banyak ditemukan masalah anak terlantar, anak nakal serta lanjut usia yang tidak terurus.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial.

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 27 Jenis tidaklah mudah dalam memberikan suatu pelayanan hanya

dengan berjalan dengan sendiri (Dinas Sosial Kabupaten Bone) oleh sebab itu peran kelembagaan seperti Karang Taruna, Organisasi Sosial, TKSM, Dunia Usaha sangat dibutuhkan dan perlu diberdayakan berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomis produktif.

- Dari 724.905 Jiwa Penduduk Kabupaten Bone terdapat 278.050 Jiwa Masyarakat Miskin atau sekitar 38,36 %, perlu perhatian khusus dalam mendorong peningkatan kesejahteraannya.
- Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Di Kabupaten Bone terdapat Makam Pahlawan yang luasnya ± 1,5 Ha yang dihuni sementara 267 Pahlawan. Akan tetapi Taman Makam Pahlawan ini masih belum maksimal dalam pengelolaannya.

3. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

- Setiap Tahunnya Kabupaten Bone dilanda bencana banjir utamanya daerah bagian utara sepanjang sungai Walanna'E yaitu Kecamatan Ajangale, Kecamatan Dua BoccoE, Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Tellu Siattinge, bagitu juga Daerah Pesisir Selatan Teluk Bone seperti Kecamatan Salomekko, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Tonra. Selain daripada itu petani dan petani tambak di Kecamatan SibuluE mengalami kerugian besar akibat banjir yang disebabkan meluapnya sungai Pattiro setiap tahunnya.
- Frekuensi kebakaran dan angin puting beliung di Kabupaten Bone menunjukkan intensitas tinggi.
- Pada era sekarang korban tindak kekerasan dan pekerja migran semakin marak, apakah itu tindak kekerasan terhadap anak maupun tindak kekerasan dalam rumah tangga.

4. Bidang Informasi dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

- Karena banyaknya jenis permasalahan sosial, maka sangat dibutuhkan data yang akurat agar program, kegiatan tepat pada sasaran.
- Perlunya suatu penelitian penyebab dari semua Permasalahan Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah dalam penanganannya.

Jika diuraikan secara umum, maka isu-isu strategis dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi fakir Miskin.
2. Rendahnya kesadaran RTSM tentang pentingnya pendidikan anak dan motivasi anak RTSM untuk menerima penghargaan.
3. Rendahnya Kapasitas Wanita Rawan Sosial Ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
4. Rendahnya kualitas hidup bagi eks kusta.
5. Tingginya tingkat kemiskinan pedesaan dan perkotaan.
6. Banyaknya rumah yang tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat miskin.
7. Banyaknya lanjut usia produktif yang tidak terberdayakan.
8. Rendahnya tingkat pola pikir dan akses perlindungan sosial bagi anak.
9. Tingginya angka Korban Penyalahgunaan Napza.
10. Rendahnya Tingkat taraf hidup bagi orang dengan Kecacatan.
11. Rendahnya tingkat derajat Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin.
12. Masih adanya Korban Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang belum tertangani.
13. Menurunnya nilai-nilai kearifan lokal yang menimbulkan konflik dan bencana sosial.
14. Kondisi Taman Makam Pahlawan sudah tidak representatif.
15. Rendahnya tingkat kemandirian dan kemampuan berusaha Para Penyandang Cacat dan eks trauma.
16. Kurangnya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemberdayaan Karang Taruna.
17. Banyaknya Korban Bencana Alam yang membutuhkan akses Perlindungan Sosial.
18. Terbatasnya bantuan jaminan hidup terhadap Penyandang Lanjut Usia Tidak Produktif dan Penyandang Cacat Berat.
19. Belum adanya akses Jaminan Perlindungan bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
20. Rendahnya tingkat keterampilan para Anak Terlantar, Penyandang Cacat dan eks Narapidana.

21. Kurangnya perhatian terhadap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
22. Kurangnya dukungan terhadap Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah :

A. MASSEDI BOLA (Mari Melayani Sesama Dengan Berkeadilan Bersama Orang-Orang Pilihan)

Inovasi ini dibentuk karena adanya Sistem Pelayanan bagi Orang-orang Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang membutuhkan proses yang lama. Tujuan dari pembentukan Inovasi ini adalah untuk mempercepat proses pelayanan baik secara teknis maupun administrasi dalam penanganan khususnya bagi Orang terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya pada umumnya. Manfaatnya untuk memberikan akses yang cepat terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi Orang Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya pada umumnya.

B. TAGANA REMAJA (Taruna Siaga Bencana Remaja)

Inovasi ini dibentuk karena adanya Kejadian Bencana hanya ditangani Orang-Orang terlatih yang tergabung Pada Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang telah direkrut dan jumlahnya masih sangat terbatas. Tujuan dari pembentukan Inovasi ini adalah untuk merekrut dan menciptakan kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang sukarela dan paham serta mampu melakukan penanganan bencana secara dini seperti kalangan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diharapkan menjadi pilar terdepan yang bergerak baik pada saat Pra dan saat Kejadian Maupun Pasca Bencana. Manfaatnya agar Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dapat menjadi Kader dalam mensosialisasikan tentang pencegahan bencana dan dapat menangani bencana secara dini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Dinas Sosial Kabupaten Bone selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 VISI :

**" TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN YANG BERKESEJAHTERAAN SOSIAL,
BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN "**

Visi ini bertujuan untuk mewujudkan optimalnya kinerja Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas di bidang kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

2.1.2 MISI:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.
3. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan Kesejahteraan Sosial.
4. Memelihara, memperkuat stabilisasi sosial dan integrasi sosial melalui usaha-usaha memperkecil kesenjangan sosial.
5. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengembangan kesejahteraan dengan melibatkan unsur-unsur Tokoh Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna, PSM/TKSM dan ORSOS/LSM yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial.
6. Melestarikan nilai-nilai semangat juang, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

2.1.3 TUJUAN DAN INDKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.
3. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan Kesejahteraan Sosial.
4. Memelihara, memperkuat stabilisasi sosial dan integrasi sosial melalui usaha-usaha memperkecil kesenjangan sosial.
5. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengembangan kesejahteraan dengan melibatkan unsur-unsur Tokoh Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna, PSM/TKSM dan ORSOS/LSM yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial.
6. Melestarikan nilai-nilai semangat juang, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan pemberdayaan serta sumber daya manusia kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan dan memantapkan sistem koordinasi, sinkronisasi dan informasi kesejahteraan sosial .
4. Meningkatkan dan memantapkan kemitraan serta peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta kesenjangan.
5. Mewujudkan organisasi sosial kemasyarakatan yang berdayaguna dan berhasilguna.
6. Meningkatkan sistem nilai dan sikap sosial individu dalam mendukung usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesejahteraan sosial.	Jumlah Kecamatan yang terlayani Program Keluarga Harapan (PKH)/Kec.	Kec.	10	27
	Jumlah Keluarga Miskin (KM) yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/KM	Kube	4	56
Meningkatkan pemberdayaan serta sumber daya manusia kesejahteraan sosial masyarakat.	Jumlah Anak Terlantar dan Putus Sekolah yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	Orang	10	85
Meningkatkan pelayanan dan memantapkan sistem koordinasi, sinkronisasi dan informasi kesejahteraan sosial .	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	Orang	10	115
Meningkatkan dan memantapkan kemitraan serta peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta kesenjangan.	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/UEP	UEP	0	15
	Jumlah Korban Bencana Alama dan Bencana Sosial yang Tertangani/Kec.	Kec.	0	27
Mewujudkan organisasi sosial kemasyarakatan yang berdayaguna dan berhasilguna.	Jumlah Karang Taruna (KT) dan Orsos yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosisl/KT	KT	0	20
Meningkatkan sistem nilai dan sikap sosial individu dalam mendukung usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial.	Jumlah Panti Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang menda0pat Program Pemberdayaan Sosial/Unit	Unit Panti	0	5
		Unit LK3		1

2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Sasaran :

1. Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 2.1.4

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Kecamatan yang terlayani Program Keluarga Harapan (PKH)/Kec.	Kec.	10	27
	Jumlah Keluarga Miskin (KM) yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/KM	Kube	4	56
	Jumlah Anak Terlantar dan Putus Sekolah yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	Orang	10	85
	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	Orang	10	115
	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/UEP	UEP	0	15
	Jumlah Korban Bencana Alama dan Bencana Sosial yang Tertangani/Kec.	Kec.	27	27
	Jumlah Karang Taruna (KT) dan Orsos yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosisi/KT	KT	0	20
	Jumlah Panti Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mendapat Program Pemberdayaan Sosial/Unit	Unit Panti Unit LK3	3 1	5 1

2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.1.5

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelegaraan Pemerintahan di Bidang Kesejahteraan Sosial dengan Good Governance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran 2 : Meningkatnya penghasilan dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial.	1. <i>Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.</i>
Sasaran 3 : Teratasinya permasalahan kesejahteraan sosial secara efektif dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia
Sasaran 4 : Terciptanya stabilitas sosial masyarakat serta menurunnya kesenjangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Anak Terlantar 2. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 3. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya. 4. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sasaran 5 : Berkembangnya organisasi - organisasi sosial kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna.	1. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sasaran 6 : Terwujudnya Sistem dan Sikap Sosial Individu dalam Mendukung Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial.	1. <i>Pengelolaan Areal Pemakaman</i>

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Sosial Kabupaten Bone telah menetapkan PK sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Penanganan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Kecamatan yang terlayani Program Keluarga Harapan (PKH)/Kec.	Kec.	27
	Jumlah Keluarga Miskin (KM) yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/KM	Kube	17
	Jumlah Anak Terlantar dan Putus Sekolah yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	Orang	25
	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	Orang	35
	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/UEP	UEP	7
	Jumlah Karang Taruna (KT) dan Orsos yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosisl/KT	KT	6
	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tertangani/Kec.	Kec	27
	Jumlah Panti Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mendapat Program Pemberdayaan Sosial/Unit	Unit Panti Unit LK3	5 1

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi untuk tahun kedepan. Dinas Sosial Kabupaten Bone telah menetapkan IKU Tahun 2018 serta IKU 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3 IKU DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE TAHUN 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Rekapitulasi Data PMKS, Basis Data Terpadu (BDT)

Tabel 2.3 IKU DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE TAHUN 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Diolah dari data bidang-bidang Pada Dinas Sosial Kab. Bone
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persen	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang Berpartisipasi}}{\text{Jumlah PSKS yang ada Sesuai dengan Permensos}} \times 100\%$	Diolah dari data bidang-bidang Pada Dinas Sosial Kab. Bone

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 5.887.825.945,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Rencana Belanja Dinas Sosial Kabupaten Bone TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.092.955.945	52,53
2	Belanja Langsung	2.794.870.000	47,47
	Jumlah	5.887.825.945	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Kecamatan yang terlayani Program Keluarga Harapan (PKH)/Kec.	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1. Rapat Koordinasi dan Service Provider PKH	350.000.000	58,73
			2. Pendataan PMKS dan PSKS	455.870.000	
		2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	50.000.000	
	Jumlah Keluarga Miskin (KM) yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/KM	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	86.422.900	4,48
2. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi			65.348.100		

	Jumlah Anak Terlantar dan Putus Sekolah yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	1. Pembinaan Anak Terlantar	1. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	74.625.000	5,12
	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	1. Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	80.625.300	5,53
	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/UEP	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	90.664.350	17,85
		2. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia	81.337.500	
	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tertangani/Kec.	1. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	88.148.000	

	Jumlah Karang Taruna (KT) dan Orsos yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosisl/KT	1. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	75.571.600	8,28
			2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	45.125.000	
	Jumlah Panti Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mendapat Program Pemberdayaan Sosial/Unit		-	-	0
TOTAL				1.457.314.850	100,00

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone sebesar Rp. 1.457.314.850,- dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 47,47% dari Total Anggaran yang dikelola. Adapun Prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 1 : Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dengan Good Governance dengan indikator Jumlah Kecamatan yang terlayani Program Keluarga Harapan (PKH)/Kecamatan yaitu sebesar 58,73 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran 6 : Terciptanya sistem nilai dan sikap sosial individu dalam mendukung usaha- usaha pembangunan kesejahteraan sosial dengan indikator Jumlah Panti Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mendapat Program Pemberdayaan Sosial/Unit sebesar 0 % dari total anggaran belanja langsung, akan tetapi indikator ini mapu mencapai Target yang telah ditetapkan karena dengan adanya dukungan dari beberapa kegiatan.

Dilihat dari total anggaran untuk program/kegiatan yang belum mencapai total anggaran belanja langsung sebesar 52,53% disebabkan karena adanya beberapa Program dan Kegiatan yang tidak termasuk di dalam sasaran dan indikator kinerja tahun 2018, akan tetapi mendukung dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone di antaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik dengan Besaran Anggaran Rp. 29.200.000 atau sekitar 1.04 % dari total Anggaran Belanja Langsung.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Besaran Anggaran Rp. 126.861.000 atau sekitar 4.54 % dari total Anggaran Belanja Langsung.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan dengan besaran Anggaran Rp. 8.500.000 atau sekitar 0.30 % dari total Anggaran Belanja Langsung.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dengan besaran Anggaran Rp. 220.319.500 atau sekitar 7.88 % dari total Anggaran Belanja Langsung.
- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan besaran Anggaran Rp. 149.803.650 atau sekitar 5.35 % dari total Anggaran Belanja Langsung.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan besaran Anggaran Rp. 93.525.500 atau sekitar 3,35 % dari total Anggaran Belanja Langsung.
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan besaran Anggaran Rp. 76.250.000 atau sekitar 2,73 % dari total Anggaran Belanja Langsung.
- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan besaran Anggaran Rp. 266.480.000 atau sekitar 9,53 % dari total Anggaran Belanja Langsung.
- Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan besaran Anggaran Rp. 42.500.000 atau sekitar 1.52 % dari total Anggaran Belanja Langsung.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan besaran Anggaran Rp. 19.822.500 atau sekitar 0.71 % dari total Anggaran Belanja Langsung.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan besaran Anggaran Rp. 74.850.000 atau sekitar 2.68 % dari total Anggaran Belanja Langsung.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan besaran Anggaran Rp. 7.400.000 atau sekitar 0.37 % dari total Anggaran Belanja Langsung.

3. Peningkatan Capaian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan besaran Anggaran Rp. 104.500.000 atau sekitar 3,74 % dari total Anggaran Belanja Langsung.

4. Pengelolaan Areal Pemakaman

- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman/Taman Makam Pahlawan dengan besaran Anggaran Rp. 72.225.000 atau sekitar 2,58 % dari total Anggaran Belanja Langsung.

Sehingga total anggaran Belanja Langsung yang digunakan untuk mencapai target sasaran, tujuan, visi dan misi serta indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone sebesar Rp. 2.794.870.000,- atau sebesar 47,47% belum termasuk Belanja Tidak Langsung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

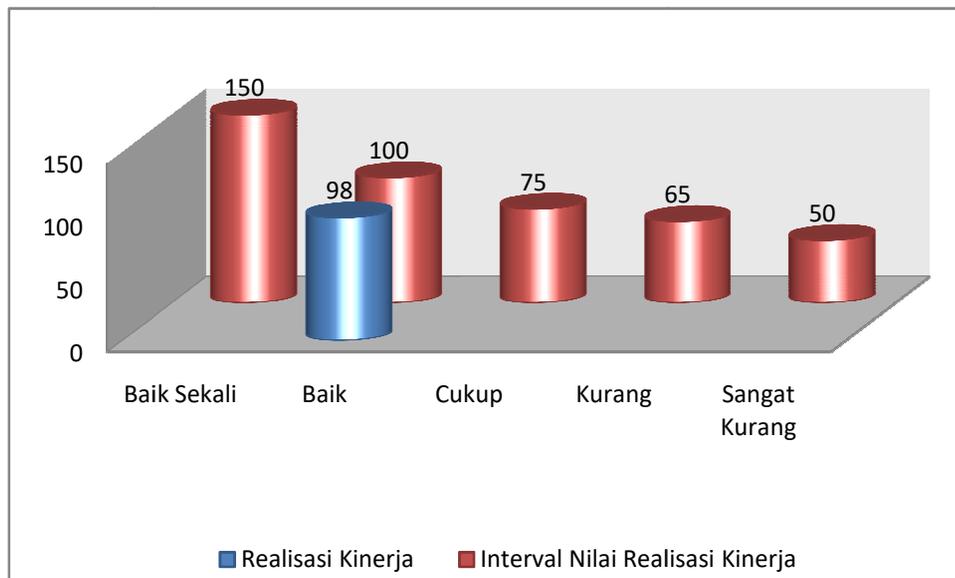
Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 6 sasaran dengan 8 indikator sasaran dengan pencapaian indikator sasaran yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
1.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	8	BS =	B = 98,03 %	SK =
			C =	K =	
	JUMLAH	8	BS =	B = 98,03 %	SK =
			C =	K =	



3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2018 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PKMS yang tertangani	90.366	92.184	98,03

Dari 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Sasaran 1			
Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	98,03
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah	1	98,03

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja, diketahui bahwa 1 indikator sasaran atau 98,03 % Baik,.

3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bone tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Dinas Sosial Kabupaten Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

A. Sasaran 1: Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Strategis

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja

Sasaran : Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja %
1.	Jumlah Kecamatan yang terlayani Program Keluarga Harapan (PKH)/Kec.	27	27	100,00
2.	Jumlah Keluarga Miskin (KM) yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/KM	17	7	41,18
3.	Jumlah Anak Terlantar dan Putus Sekolah yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	25	5	20,00
4.	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	35	6	17,14
5.	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/UEP	7	6	85,71
6.	Jumlah Korban Bencana Alama dan Bencana Sosial yang Tertangani/Kec.	27	27	100,00
7.	Jumlah Karang Taruna (KT) dan Orsos yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosisl/KT	6	3	50,00
8.	Jumlah Panti Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mendapat Program Pemberdayaan Sosial/Unit	5 1	5 1	100,00 100,00

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

**Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran : Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

No	Indikator Kinerja	Capaian					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kecamatan yang terlayani Program Keluarga Harapan (PKH)/Kec.	10	10	27	27	27	27
2.	Jumlah Keluarga Miskin (KM) yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/KM	4	6	8	11	8	7
3.	Jumlah Anak Terlantar dan Putus Sekolah yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	20	19	18	18	25	5
4.	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	14	25	34	34	25	6
5.	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/UEP	0	0	0	3	5	6
6.	Jumlah Korban Bencana Alama dan Bencana Sosial yang Tertangani/Kec.	27	27	27	27	27	27
7.	Jumlah Karang Taruna (KT) dan Orsos yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosisl/KT	2	1	2	6	3	3
8.	Jumlah Panti Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mendapat Program Pemberdayaan Sosial/Unit	3	3	5	5	5	5
		1	1	1	1	1	1

c. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Ada 5 Program dan 10 Kegiatan untuk mencapai setiap sasaran dan indikator kinerja diantaranya adalah :

No.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran						
					Target Jumlah		Realisasi		% Realisasi		
1	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Kecamatan yang terlayani Program Keluarga Harapan (PKH)/Kec.	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1. Rapat Koordinasi dan Service Provider PKH	350.000.000	855.870.000	342.250.000	760.103.300	97,79	60,61	
				2. Pendataan PMKS dan PSKS	455.870.000		368.153.300		80,76		
				3. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	50.000.000		49.700.000		99,40		
2	Jumlah Keluarga Miskin (KM) yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/KM	Jumlah Keluarga Miskin (KM) yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/KM	2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	86.422.900	151.771.000	86.422.900	151.771.000	100,00	100,00	
				5. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	65.348.100		65.348.100		100,00		

3	Jumlah Anak Terlantar dan Putus Sekolah yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	3.	Pembinaan Anak Terlantar	6.	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	74.625.000		74.625.600		100,00
4	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	4.	Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma		Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	80.625.300		80.265.300		99,55
5	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/UEP		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	7.	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	90.664.350	172.001.850	89.764.350	171.101.850	99,01
			Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	81.337.500		81.337.500		100,00

6	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tertangani/Kec.		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	9.	Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	88.148.000	88.148.000	100,00
7	Jumlah Karang Taruna (KT) dan Orsos yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosisl/KT	5.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	75.571.600	72.571.600	96,03
8	Jumlah Panti Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mendapat Program Pemberdayaan Sosial/Unit				-	0	0	0
TOTAL						1.498.612.750	1.339.773.360	89,40

Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dapat dilihat dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

01 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.098.305.350,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.001.639.550,-** atau **91,20** persen.

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

Dengan capaian pemberian 7 paket bantuan hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin berupa

➤ Paket Bantuan Alat Pertukangan Kayu sebanyak 7 paket yakni

- 1) Desa Bulumpare Kecamatan Awangpone
- 2) Desa Salebba Kecamatan Ponrè
- 3) Desa Biccoing Kecamatan Tonra
- 4) Desa Mallinrung Kecamatan Libureng
- 5) Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanètè Riattang Timur
- 6) Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo
- 7) Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibuluè

2. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Dengan capaian pemberian 5 paket bantuan hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) berupa

➤ Paket Bantuan Alat Penjahitan sebanyak 5 Paket yakni

- 1) Desa Pakkasalo Kecamatan Sibuluè
- 2) Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana
- 3) Kelurahan Macègè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
- 4) Kelurahan Ta Kecamatan Tanètè Riattang
- 5) Kelurahan Waètuo Kecamatan Tanètè Riattang Timur

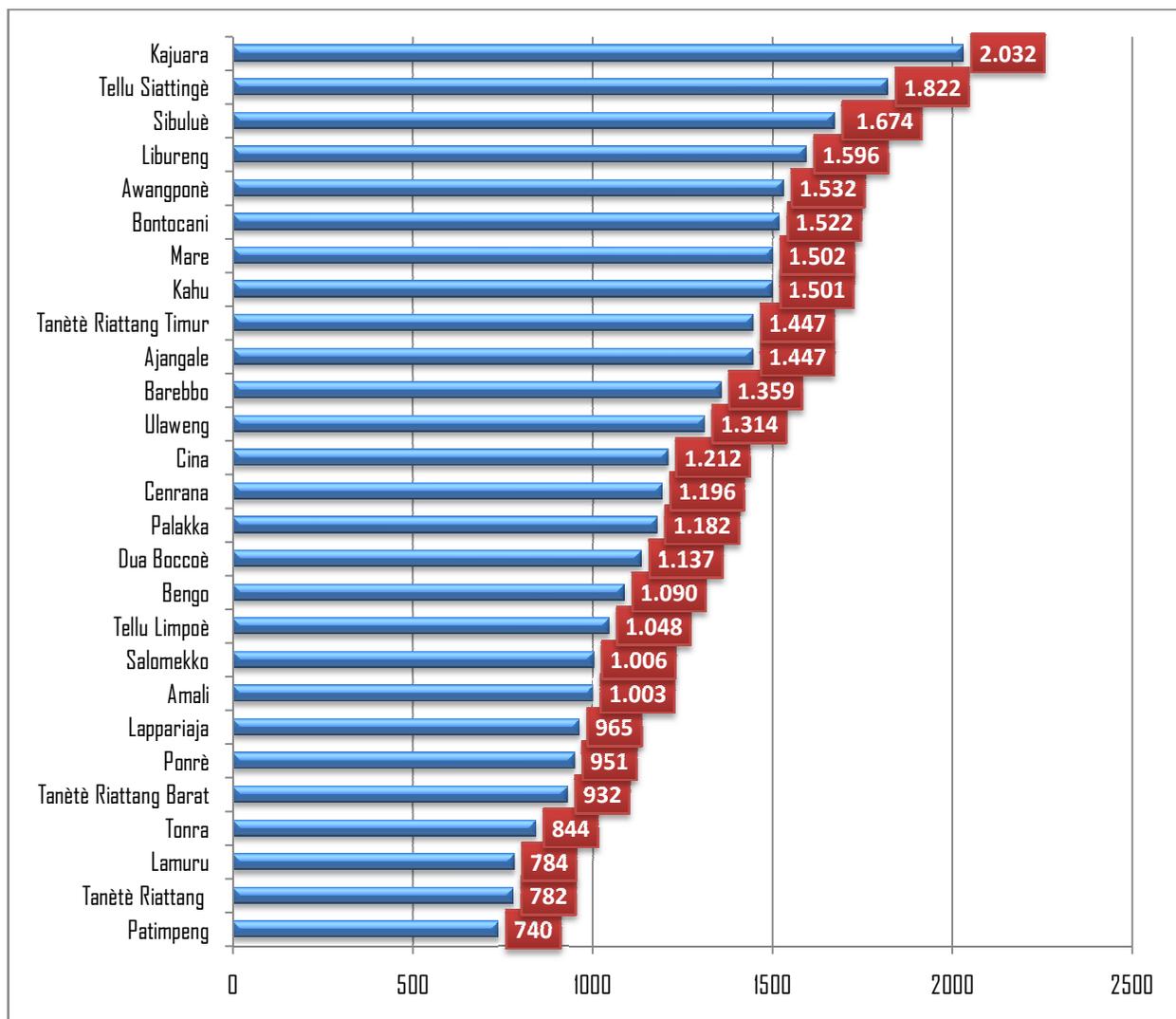
3. Pendataan / Pemutakhiran Data Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dengan Capaian telah melakukan Pendataan, Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Fakir Miskin dalam Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS – NG) serta pembuatan dokumen Profil tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.

4. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
 Dengan capaian pemberian 5 paket bantuan hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin Pesisir berupa
 - Paket Bantuan Alat Pertukangan Kayu sebanyak 5 paket yakni
 - 1) Desa Kading Kecamatan Barebbo
 - 2) Desa Watu Kecamatan Barebbo
 - 3) Desa Sumpang Minangaè Kecamatan Sibuluè
 - 4) Desa Mallusètasi Kecamatan Sibuluè
 - 5) Desa Latonro Kecamatan Cenrana
5. Rapat Koordinasi dan *Service Provider* Program Keluarga Harapan (PKH)
 Dengan Capaian kelancaran koordinasi dan pelayanan dalam pemberian subsidi bagi sekitar 19.417 Keluarga Harapan/Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau 33.620 jiwa di 27 kecamatan yang dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik

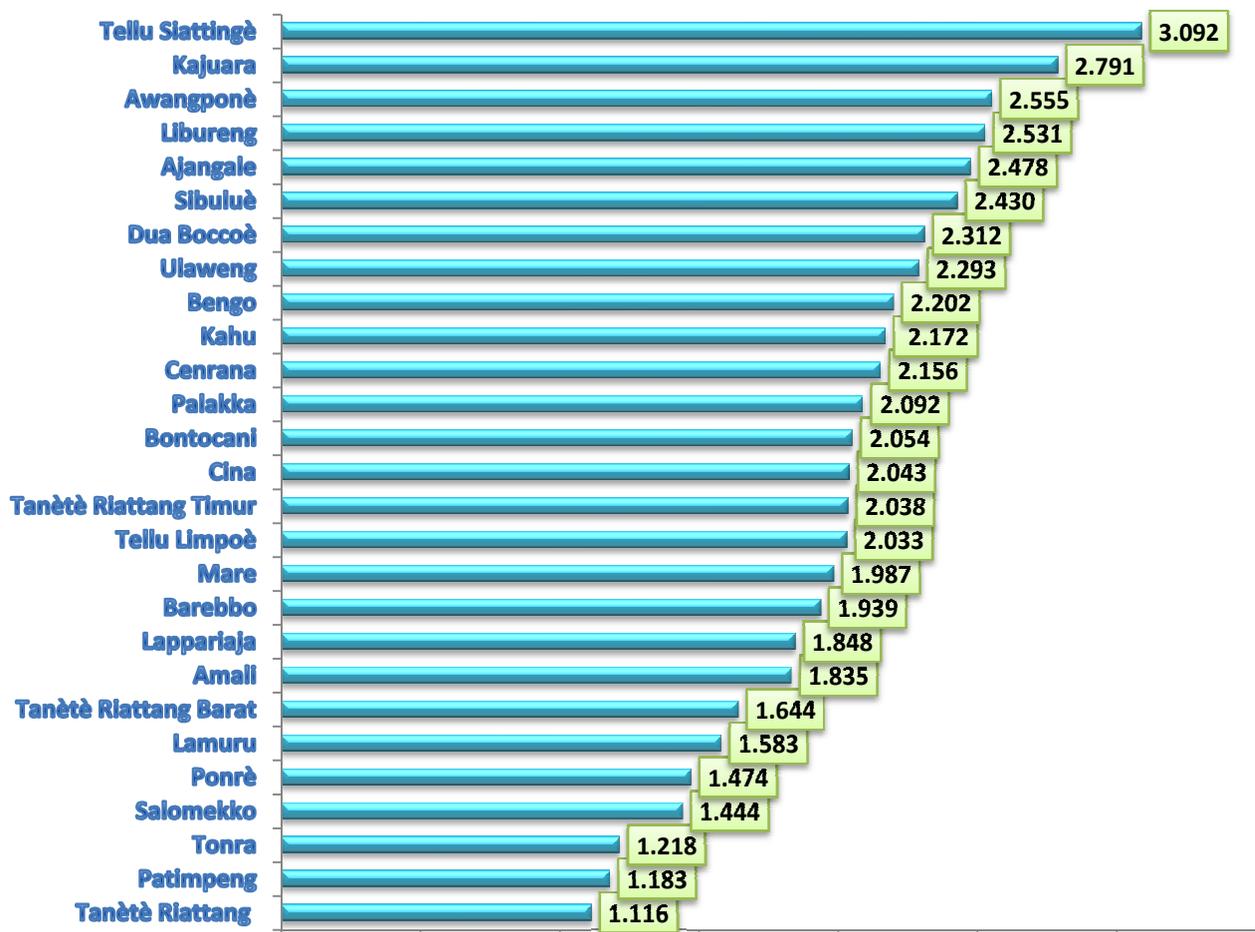
**Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/Rumah Tangga Sasaran
 Penerima Program PKH**



6. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya – Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Dengan Capaian koordinasi, pemantauan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Subsidi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Pengganti Program Rastra bagi Keluarga Miskin bagi sekitar 54.543 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) /Rumah Tangga Sasaran (RTS) di 27 kecamatan yang dapat dilihat dari grafik berikut :

Grfaik

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/ Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Subsidi Bantuan Pangan Non Tunai



02 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 169.485.500,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.169.145.500,-** atau **100** persen.

1. Penanganan Masalah – Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut

- a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana sosial dan bencana alam di wilayah Kabupaten Bone dan daerah lainnya yang terkena bencana nasional gempa bumi selama 1 tahun
 - b. biaya sewa mobilitas bagi pengambilan barang bantuan / natura dari Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan
 - c. pemberian tali asih bagi 40 orang personil Taruna Siaga Bencana (Tagana)
2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
- Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut
- Dengan Capaian pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lansia produktif yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan keterampilan di Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk 5 orang bagi Lansia Produktif
- 1) Paket UEP Jual-Jualan Campuran sebanyak 6 paket pada 6 orang dilokasi berikut:
 - a) Rosmini beralamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Kelurahan Mattirowaliè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
 - b) Petta Kanang beralamat di Jalan Bayangkara Kelurahan Watamponè Kecamatan Tanètè Riattang
 - c) Hade' beralamat di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibuluè
 - d) Abd. Muin beralamat di Desa Nagauleng Kecamatan Cènrana
 - e) A. Pati beralamat di Desa Kampuno Kecamatan Barebbo
 - f) Dodè beralamat di Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan Awangponè

03 Pembinaan Anak Terlantar dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 60.000.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 60.000.000,-** atau **100** persen

1. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
- Dengan Capaian bimbingan keterampilan kerja (Bimbingan Sosial) di Dinas Sosial Kabupaten Bone bagi 25 Orang Anak Terlantar (Putus Sekolah) serta pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak terlantar (putus sekolah) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Nirannuang Bulukumba dan Makkarèso Maros sebanyak 6 paket UEP untuk 6 orang berupa:
- 1) Paket Percetakan Sablon sebanyak 1 paket yakni atas nama Sopyan beralamat di Desa Matuju Kecamatan Awangponè:

- 2) Paket UEP Tata Rias sebanyak 2 paket di;
 - a) Jumrianti beralamat di Cabalu Kelurahan Mattirowaliè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
 - b) Selfiana Sukri beralamat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanètè Riattang Barat

- 3) Paket UEP Servis Otomotif sebanyak 2 paket di:
 - a) Rahman beralamat di Kelurahan Walannaè Kecamatan Tanètè Riattang
 - b) Abd. Rahman beralamat di Welalangè Kelurahan Bulu Tèmpè Kecamatan Tanètè Riattang Barat

04 Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 60.000.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 60.000.000,-** atau **100** persen

1. Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
 Dengan Capaian pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan keterampilan di Makassar sebanyak 5 paket untuk 5 orang berupa:
 - 1) Paket UEP Servis Elektronik sebanyak 2 paket
 - a) Askar (Tuna Daksa) beralamat di Desa Tassipi Kecamatan Amali
 - b) Israil (Tuna Daksa) beralamat di Desa Kading Kecamatan Awangponè
 - 2) Paket UEP Peternakan Ayam sebanyak 1 paket atas nama Beddu (Tuna Netra) beralamat di Desa Cakkèbone Kecamatan Awangponè
 - 3) Paket UEP Jual-Jualan Campuran sebanyak 3 paket di:
 - a) Sainuddin (Tuna Daksa) Desa Kampuno Kecamatan Barebbo
 - b) Diana (Tuna Daksa) beralamat di Desa Mallari Kecamatan Awangponè
 - c) Rosmini (Tuna Netra) Desa Carigading Kecamatan Awangponè

05 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 72.571.600,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 72.571.600,-** atau **100** persen

- 1 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
 Dengan capaian pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna yang menjadi perwakilan Kabupaten Bone dalam

- a) Karang Taruna yang berperan dalam Lomba Desa/ P2WKSS/ Karang Taruna Berprestasi, 1 Paket UEP KT bagi Karang Taruna “Assingkerukengngè”Desa Mallari Kecamatan Awangponè
- b) Karang Taruna aktif
 - 1) Paket UEP KT sebanyak 1 paket bagi Karang Taruna “Mandiri” di Desa AjallasseKecamatan Cenrana:
 - 2) Paket UEP KT sebanyak 1 paket bagi Karang Taruna “Harapan Jaya” di Desa Pattimpa Kecamatan Ponrè.

Adapun Program dan Kegiatan Pendukung lainnya yang tidak termasuk di dalam Sasaran dan Indikator Kinerja akan tetapi membatu dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 542.063.650,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 534.037.650,-** atau **98,52** persen.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik,
Capaian Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. pemenuhan biaya Telepon Kantor maupun Telepon Selulertermasuk beban Wifi dan beban Faksimili selama 1 tahun
 - b. pemenuhan beban Air PDAM selama 1 tahun
 - c. pemenuhan beban Listrik PLN selama 1 tahun
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Capaian Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. pemenuhan honorarium Tim Pemeriksa Barang yang terdiri atas 3 orang dan 1 orang Pengurus Barang serta 1 orang Panitia Pengadaan Barang
 - b. pemenuhan honorarium 1 orang Pengguna Anggaran
 - c. pemenuhan honorarium 1 orang Bendahara Pengeluaran dan 3 orang Pembantu Bendahara
 - d. pemenuhan honorarium 1 orang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),
 - e. pemenuhan honorarium masing-masing 1 orang PPK-SKPD(Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan 3 orang stafnya yakni bagian Penyiapan SPM, bagian Verifikasi dan bagian Akuntansi dan Pelaporan
 - f. pemenuhan jasa/upah kerja 2 orang Tenaga Operator untuk operator aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKUDA) dan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)

- g. pemenuhan jasa/upah kerja 7 orang Tenaga Honorer / Tenaga Administrasi (Kontrak) dan 2 orang Tenaga Operator untuk operator aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKUDA) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
 - h. pemenuhan jasa/upah kerja 3 orang Tukang Bersih (*Cleaning Service*)
 - i. pemenuhan jasa/upah kerja 3 orang Pemetong Rumput
 - j. pemenuhan jasa/upah kerja 2 orang Petugas Lapangan/ Pekerja Sosial (Peksos)
 - k. pemenuhan jasa/upah kerja 1 orang Sopir (*Driver*)
 - l. pemenuhan jasa/upah kerja 5 orang Tukang Cat Kantor dan 2 orang Tukang Cat Genteng
 - m. pemenuhan jasa/upah kerja 1 orang Operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).
 - n. pemenuhan premi asuransi ketenagakerjaan sebanyak 15 orang tenaga honorer.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Capaian Kegiatan ini adalah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 1 tahun
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Capaian Kegiatan ini adalah pemenuhan belanja pengadaan Surat Kabar/Harian/ Majalah selama 1 tahun
 5. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Capaian Kegiatan ini adalah pemenuhan biaya perjalanan dinas baik dalam daerah, maupun luar daerah selama 1 tahun
 6. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Capaian Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. pemenuhan kebutuhan pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 tahun
 - b. pemenuhan kebutuhan pembelian Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya selama 1 tahun
 - c. pemenuhan kebutuhan belanja cetak dan penggandaan selama 1 tahun
 - d. pemenuhan kebutuhan belanja makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu selama 1 tahun

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 580.828.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 574.495.100,-** atau **98,91** persen

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Capaian Kegiatan ini adalah untuk belanja pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 5 unit yakni 1 unit motor Yamaha Lexi, 1 unit motor Yamaha Soul GT dan 3 unit motor Yamaha Mio M3 .
2. Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor
Capaian Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. pengadaan 1 unit Pendingin Ruangan (*AC Split*)
 - b. pengadaan 1 unit Pesawat Televisi (*LED TV Flat*)
 - c. pengadaan 1 unit Lemari Es (Kulkas)
 - d. pengadaan 1 paket Papan Nama Kantor
 - e. pengadaan 2 unit pagar besi/pintu besi geser
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Capaian Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. pengadaan Mesin Absensi Pegawai (*Check Lock Machine*) sebanyak 1 unit
 - b. pengadaan Komputer Personal (*PC/Deskbook*) sebanyak 3 unit,
 - c. pengadaan Laptop (*Notebook*) *Asus Vivo Book* sebanyak 1 unit, Laptop (*Notebook*) *Lenovo* sebanyak 1 unit dan Laptop (*Notebook*) bagi Tenaga Pendata sebanyak 27 unit bagi 27 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk 27 kecamatan.
 - d. pengadaan Mesin Pencetak (*Printer*) sebanyak 5 unit serta
 - e. pengadaan sebanyak 3 unit *UPS*/Stabilizer
4. Pengadaan Mebeleur
Capaian Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. pengadaan Meja Rapat Panjang sebanyak 3 unit.
 - b. pengadaan Kursi Kerja untuk Eselon II sebanyak 1 unit, Kursi Kerja Eselon III sebanyak 5 unit dan Kursi Kerja Eselon IV sebanyak 15 unit
 - c. pengadaan Lemari Pajangan sebanyak 1 unit
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Capaian Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. pengadaan alat listrik & elektronik berupa bohlam (lampu listrik) selama 1 tahun
 - b. pengadaan bahan/material untuk pemeliharaan kantor seperti cat, kuas, dll selama 1 tahun.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Capaian Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. pemenuhan kebutuhan penggantian suku cadang sebanyak 3 unit kendaraan dinas roda empat dan 6 unit roda dua selama 1 tahun
 - b. belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas Oli dan Solar serta Pelumasebanyak 3 unit kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 6 unit selama 1 tahun
 - c. pemenuhan biaya pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas roda empat (mobil dinas) 3 unit dan kendaraan roda dua (motor dinas) 6 unit
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Capaian Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. pemenuhan jasa Service Peralatan kantor berupa Komputer Personal (*PC/Deskbook*) selama 1 tahun
 - b. pemenuhan jasa Service Peralatan kantor berupa Mesin Pencetak (*Printer*) selama 1 tahun

03 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 104.500.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 104.500.000,-** atau **100** persen.

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 orang dan tenaga perencana 2 orang.
 - b. pemenuhan uang lembur PNS sebanyak 10 orang dan Non PNS 1 orang
 - c. pemenuhan makanan dan minuman harian pegawai selama 1 tahun

08 Pemeliharaan Areal Pemakaman dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 72.225.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 72.225.000,-** atau **100** persen

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Taman Makam Pahlawan (TMP)
Dengan capaian kegiatan pemenuhan belanja alat listrik, bahan bangunan, upah kerja tukang cat, makanan dan minuman serta perjalanan dinas dalam rangka Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Watamponè di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kota Watamponè.

c. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada setiap sasaran ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain :

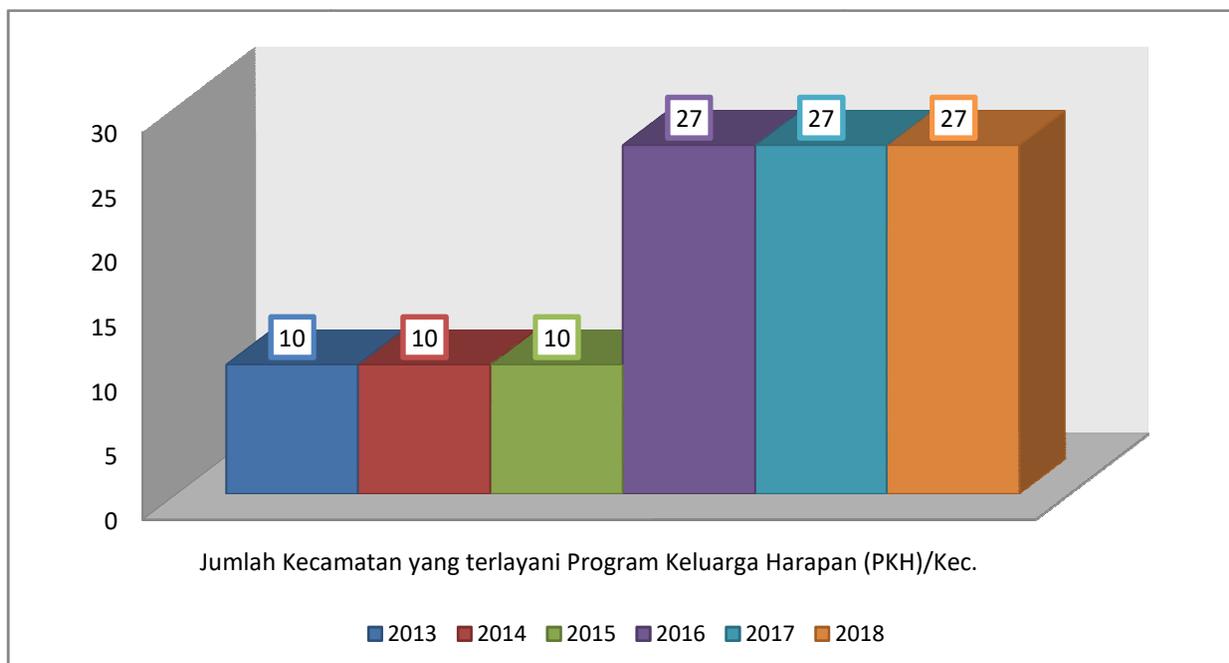
1. Dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih terkendala dari aspek pendataan yang valid dan *real time*, sedangkan perubahan sosial terjadi begitu cepat untuk itu perlu Memanfaatkan data yang ada dan melakukan verifikasi dan validasi secara terbatas.
2. Masih ada program yang belum dilaksanakan sehingga capaian sasarnya belum ada atau 0%. Untuk kedepannya memasukkan kedalam rencana kegiatan agar sasaran tersebut dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan serta solusi yang telah dilakukan per indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

Indikator 1.

Jumlah Kecamatan yang terlayani Program Keluarga Harapan

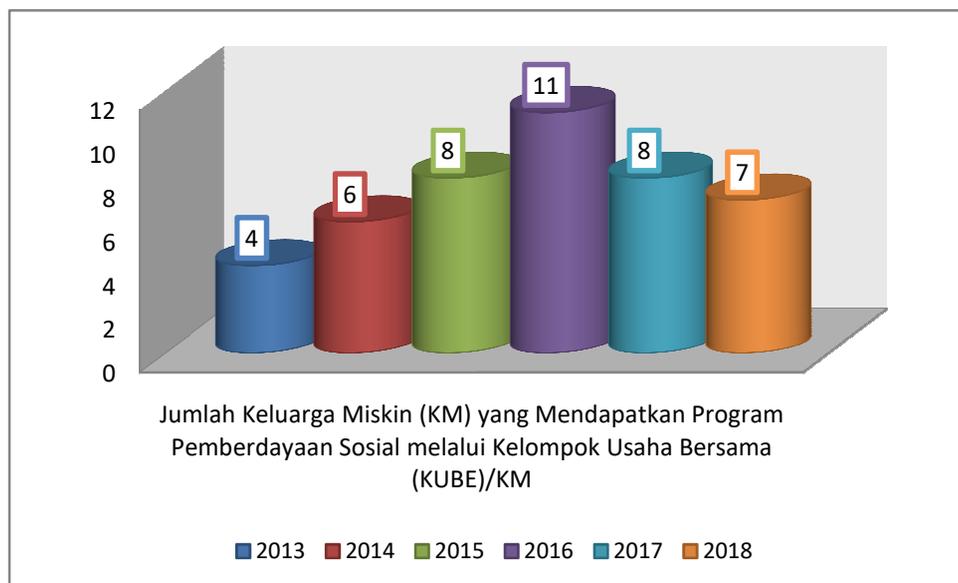


Dari Data diatas pada tahun 2013 Dinas Sosial hanya mampu merealisasikan 10 Kecamatan untuk penanganan Program Keluarga Harapan dikarena pada tahun 2013 Dinas Sosial hanya diberi kewenangan untuk menangani 10 kecamatan saja sebagai data sampel. Hingga di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 Program Keluarga

Harapan Telah menyalurkan bantuan di 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone dengan realisasi Capaian 100% dimana Keluarga Harapan yang di tangani sebesar 19.417 RTSM atau 33.620 Jiwa.

Indikator 2.

Jumlah Keluarga Miskin (KM) yang mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE/UEP)/KM

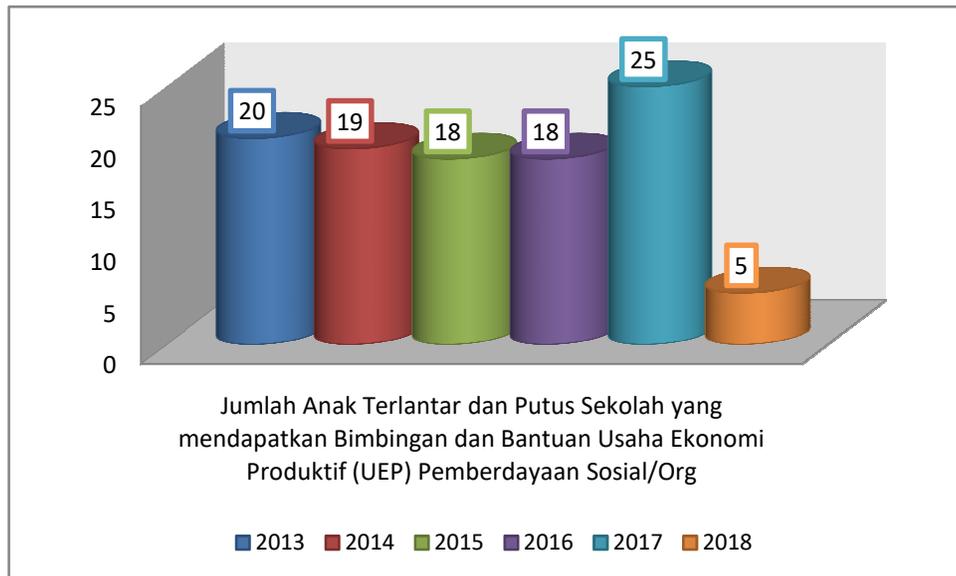


Untuk indikator 2 Jumlah Keluarga Miskin Di Kabupaten Bone yang mendapatkan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2013 sebanyak 4 KUBE tahun 2014 sebanyak 6 KUBE dan Tahun 2015 sebanyak 8 KUBE meningkat pada tahun 2016 sebanyak 11 KUBE dan pada tahun 2017 sebanyak 8 KUBE dan pada tahun 2018 dengan capaian pemberian 7 paket bantuan hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin berupa Paket Bantuan Alat Pertukangan Kayu sebanyak 7 paket yakni :

- 1) Desa Bulumpare Kecamatan Awangpone
- 2) Desa Salebba Kecamatan Ponrè
- 3) Desa Bicoing Kecamatan Tonra
- 4) Desa Mallinrung Kecamatan Libureng
- 5) Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanètè Riattang Timur
- 6) Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo
- 7) Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibuluè

Indikator 3.

Jumlah Anak Terlantar dan Putus Sekolah yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org

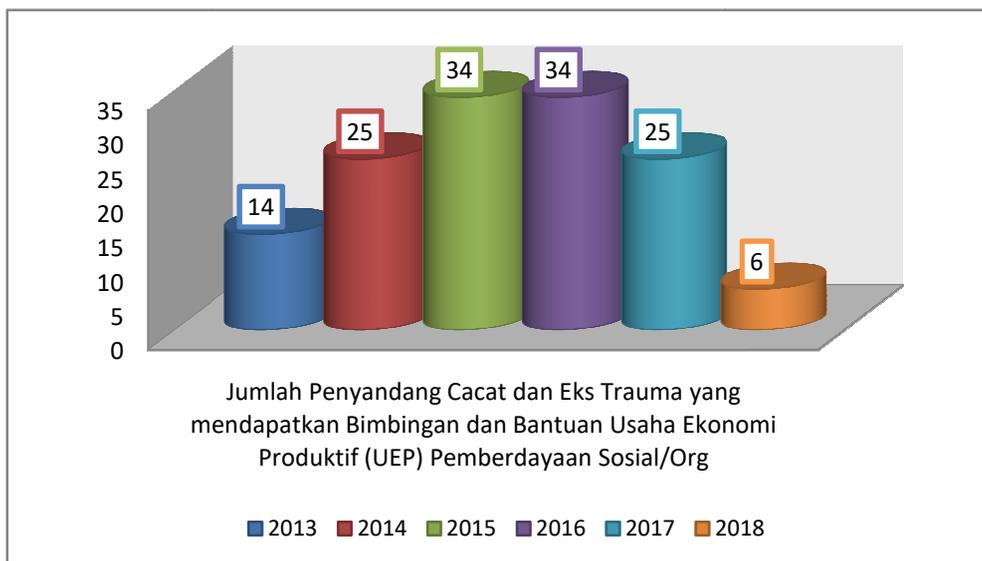


Dengan Capaian indicator 3 Dinas Sosial Kabupaten Bone (Putus Sekolah) serta pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak terlantar (putus sekolah) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Nirannuang Bulukumba dan Makkarèsò Maros sebanyak 5 paket UEP untuk 5 orang pada tahun 2018 berupa :

- 1) Paket Percetakan Sablon sebanyak 1 paket yakni atas nama Sopyan beralamat di Desa Matuju Kecamatan Awangponè:
- 2) Paket UEP Tata Rias sebanyak 2 paket di ;
 - a) Jumrianti beralamat di Cabalu Kelurahan Mattirowaliè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
 - b) Selfiana Sukri beralamat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanètè Riattang Barat
- 3) Paket UEP Servis Otomotif sebanyak 2 paket di :
 - a) Rahman beralamat di Kelurahan Walannaè Kecamatan Tanètè Riattang
 - b) Abd. Rahman beralamat di Welalangè Kelurahan Bulu Tèmpè Kecamatan Tanètè Riattang Barat

Indikator 4.

Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org

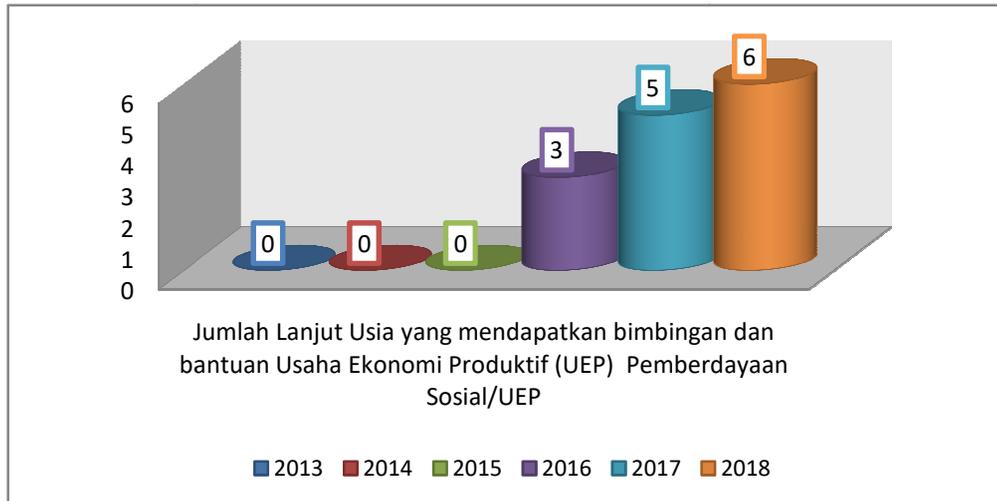


Untuk Indikator 4 Jumlah Disabilitas (Penyandang Cacat) yang telah diberikan bimbingan/Pelatihan Berwirausaha sebanyak 14 Orang dimana pada tahun 2014 juga telah dilakukan bimbingan/Pelatihan Berwirausaha sebanyak 25 Orang dan meningkat pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 34 Orang dan pada Tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Bone hanya menangani 25 Orang Disabilitas dimana 5 Orang diantaranya telah diseleksi untuk diberikan Paket Bantuan Usaha dan pada Tahun 2018 hanya 6 orang yang diberikan Bantuan. Pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan keterampilan di Makassar sebanyak 6 paket untuk 6 orang berupa:

1. Paket UEP Servis Elektronik sebanyak 2 paket
 - a) Askar (Tuna Daksa) beralamat di Desa Tassipi Kecamatan Amali
 - b) Israil (Tuna Daksa) beralamat di Desa Kading Kecamatan Awangponè
2. Paket UEP Peternakan Ayam sebanyak 1 paket atas nama :
 - a) Beddu (Tuna Netra) beralamat di Desa Cakkèbone Kecamatan Awangponè
3. Paket UEP Jual-Jualan Campuran sebanyak 3 paket di:
 - a) Sainuddin (Tuna Daksa) Desa Kampuno Kecamatan Barebbo
 - b) Diana (Tuna Daksa) beralamat di Desa Mallari Kecamatan Awangponè
 - c) Rosmini (Tuna Netra) Desa Carigading Kecamatan Awangponè

Indikator 5.

Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha EKonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/UEP

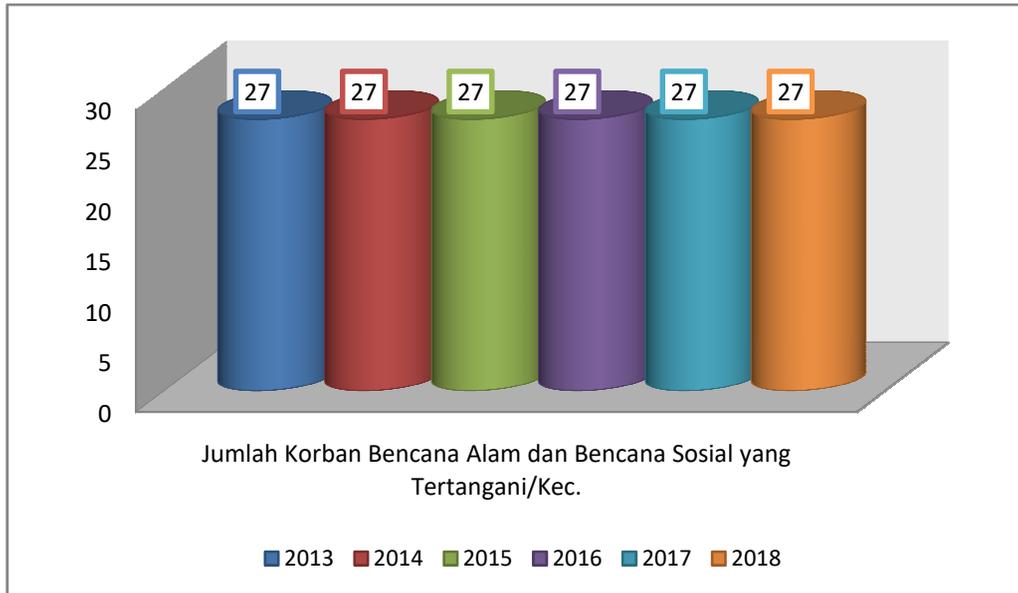


Pada indikator 5 Dinas Sosial belum melakukan penanganan bagi para Lanjut Usia dikarenakan belum ada kegiatan yang diusulkan untuk melakukan penanganan Lansia hingga pada Tahun 2016 telah dilakukan kegiatan pemberian paket bantuan usaha bagi Lajut Usia yang masih produktif untuk berwirausaha dan pada tahun 2017 telah dilakukan penangan untuk 7 Orang Lanjut Usia begitu pula untuk tahun 2018 Dinas Sosial telah memberikan Paket Bantuan bagi 6 Orang lansia yang masih produktif. Dengan Capaian pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lansia produktif yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan keterampilan di Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk 5 orang bagi Lansia Produktif

1. Paket UEP Jual-Jualan Campuran sebanyak 6 paket pada 6 orang dilokasi berikut:
 - a) Rosmini beralamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Kelurahan Mattirowaliè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
 - b) Petta Kanang beralamat di Jalan Bayangkara Kelurahan Watamponè Kecamatan Tanètè Riattang
 - c) Hade' beralamat di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibuluè
 - d) Abd. Muin beralamat di Desa Nagauleng Kecamatan Cènrana
 - e) A. Pati beralamat di Desa Kampuno Kecamatan Barebbo
 - f) Dodè beralamat di Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan Awangponè

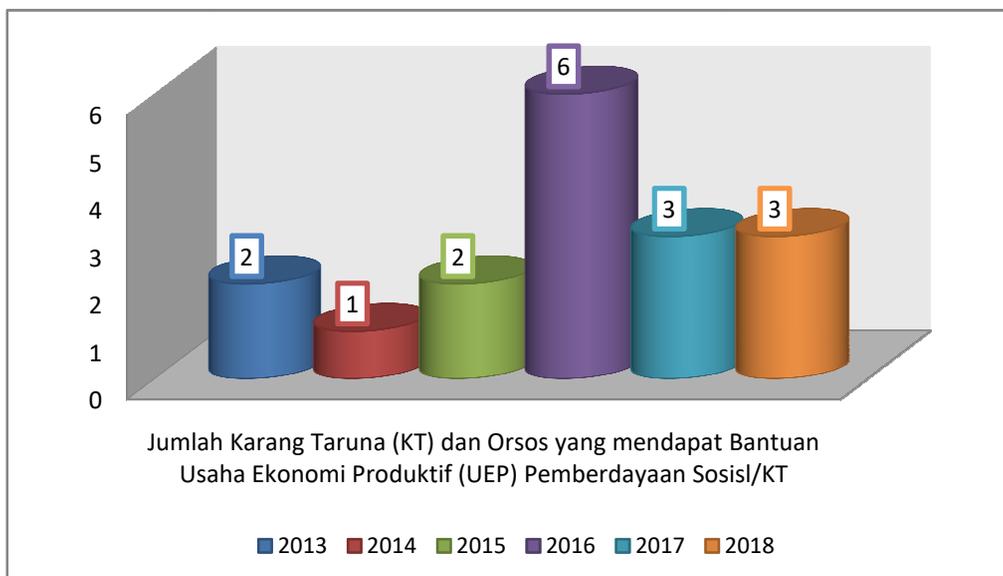
Indikator 6.

Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani/Kec.



Indikator 7.

Jumlah Karang Taruna (KT) dan Orsos yang mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/KT

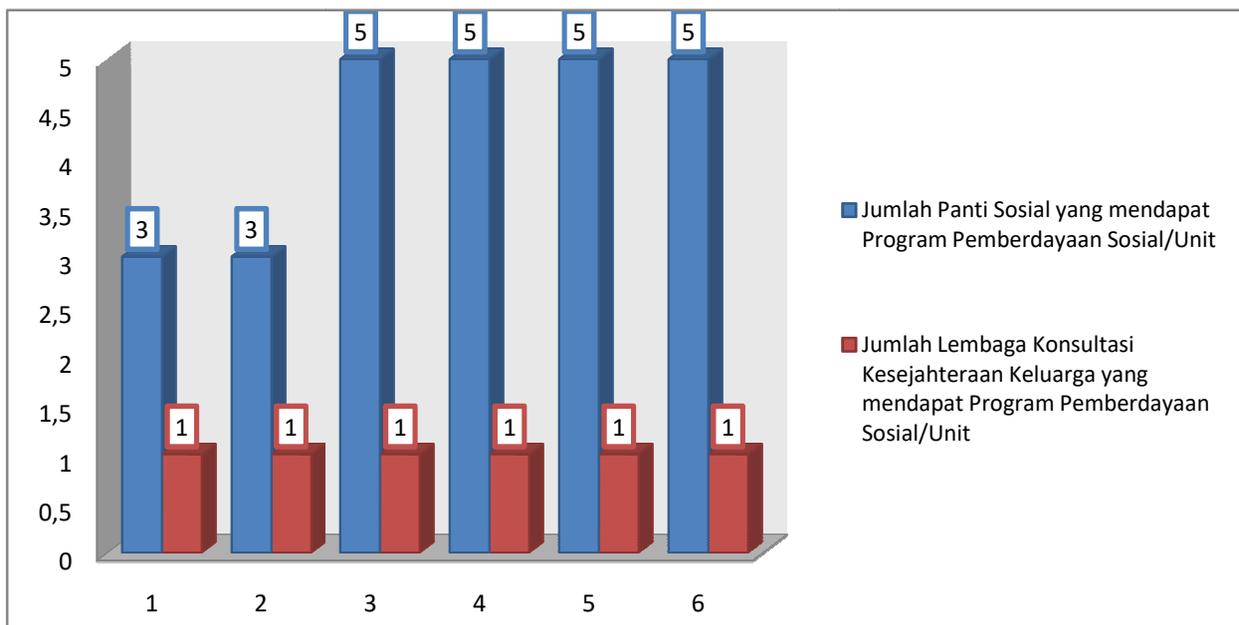


Dengan capaian pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna yang menjadi perwakilan Kabupaten Bone dalam program P2WKSS dan Karang Taruna Aktif pada tahun 2018 ada 3 Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yaitu :

1. Karang Taruna yang berperan dalam Lomba Desa/ P2WKSS/ Karang Taruna Berprestasi yaitu :
 - a) Paket UEP KT bagi Karang Taruna “Assingkerukengngè”Desa Mallari Kecamatan Awangponè
2. Karang Taruna aktif
 - a) Paket UEP KT sebanyak 1 paket bagi Karang Taruna “Mandiri” di Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana:
 - b) Paket UEP KT sebanyak 1 paket bagi Karang Taruna “Harapan Jaya” di Desa Pattimpa Kecamatan Ponrè

Indikator 8.

Jumlah Panti Sosial yang mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial/Unit dan Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial/Unit



b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari **98,03 %**. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari **98,03 %**, yaitu sebanyak 1 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator 1.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya penanganan terhadap	Jumlah Kecamatan yang terlayani Program Keluarga Harapan (PKH)/Kec.	100	88,81	75,17
2.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Keluarga Miskin (KM) yang Mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/KM	41,18	100,00	
3.		Jumlah Anak Terlantar dan Putus Sekolah yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	20,00	100,00	
4.		Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Bimbingan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/Org	17,14	99,55	
5.		Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosial/UEP	85,71	99,48	
6.		Jumlah Korban Bencana Alama dan Bencana Sosial yang Tertangani/Kec.	100,00	100,00	
7.		Jumlah Karang Taruna (KT) dan Orsos yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Sosisl/KT	50,00	96,03	
8.		Jumlah Panti Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mendapat Program Pemberdayaan Sosial/Unit	100	0	
Rata – rata capaian Kinerja			64,25	85,48	75,17

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 64,25%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 85,48%, maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 75,17%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

A. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018, didukung dengan dana sejumlah **Rp. 4.640.306.200,00** yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

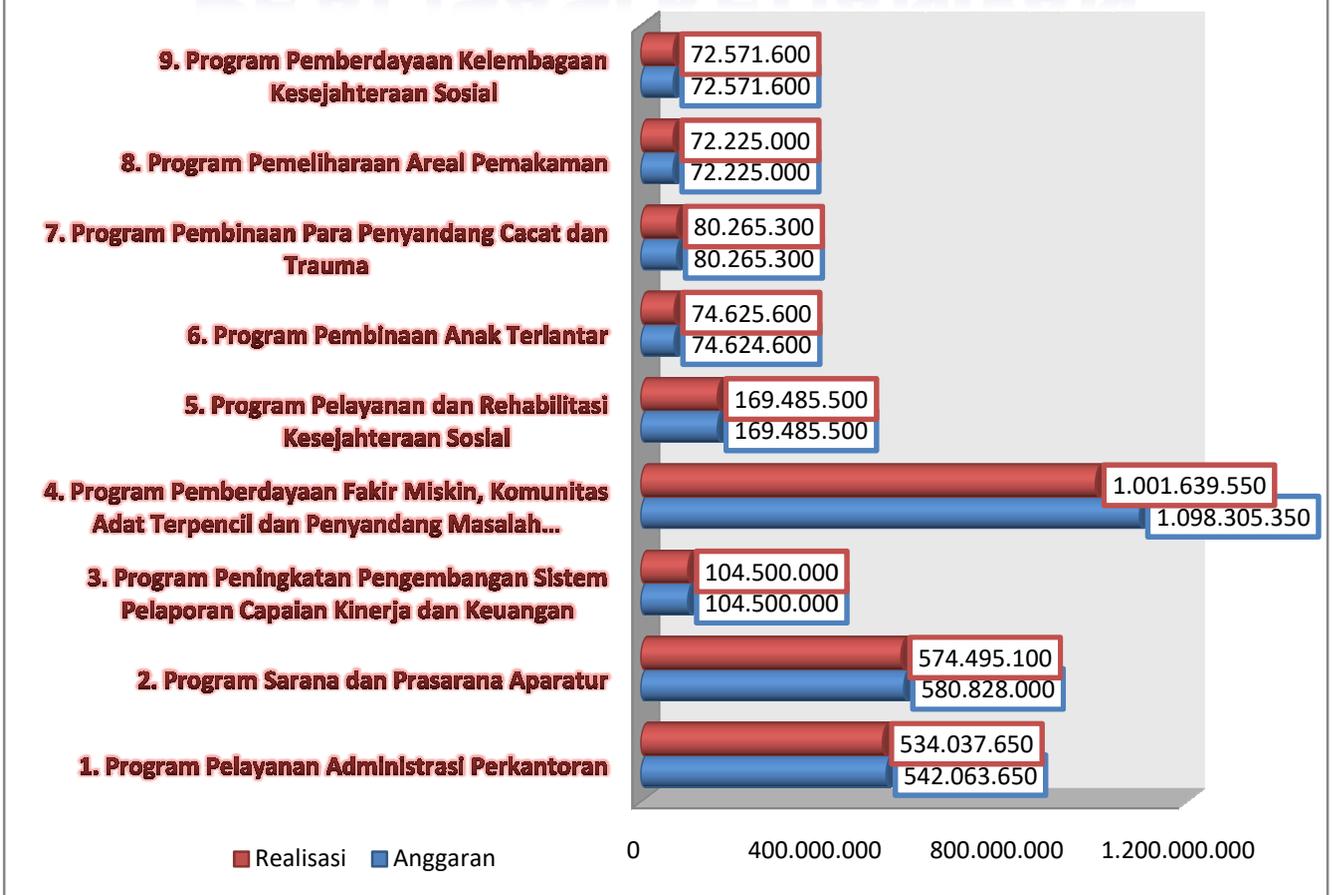
Dibawah ini disampaikan capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 melalui Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bone :

Tabel 5.1 Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018

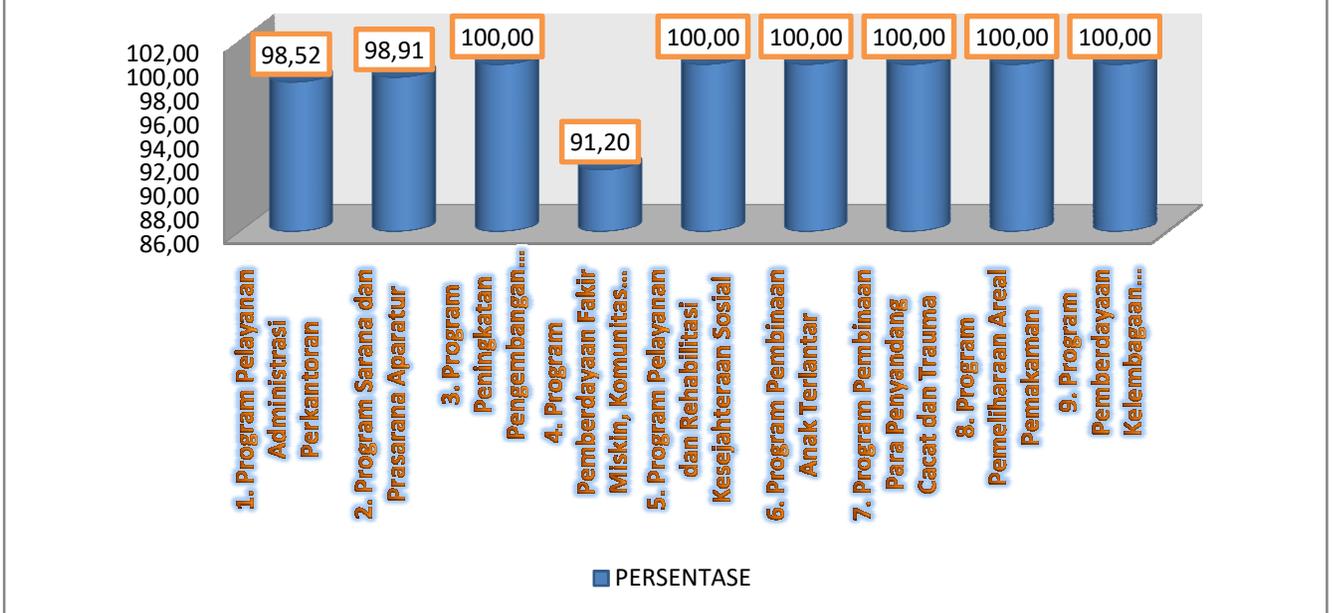
No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	4.640.306.200	4.431.977.343	95.51
	Belanja Pegawai	2.740.306.200	2.562.971.593	93.53
B.	Belanja Langsung	1.950.000.000	1.869.005.750	98.37
	Terdiri dari :			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	559.715.000	550.362.250	98.33
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	30.700.000	28.332.250	92.29
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	134.500.000	130.000.000	96.65
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.000.000	9.000.000	100
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.500.000	11.015.000	81.59
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	255.000.000	255.000.000	100
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	117.015.000	117.015.000	100
2.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	244.660.000	243.918.505	99.70
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	41.250.000	41.250.000	100
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000	100
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	77.500.000	77.500.000	100
	- Pengadaan Mebeleur	10.250.000	10.250.000	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	28.050.000	28.050.000	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	70.500.000	69.760.000	98.95
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.110.000	7.108.500	99.98

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	130.500.000	130.500.000	100
	- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	130.500.000	130.500.000	100
4.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	530.000.000	530.000.000	100
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	78.500.000	78.500.000	100
	- Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan	350.000.000	350.000.000	100
	- Pendataan PMKS dan PSKS	50.000.000	50.000.000	100
	- Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	51.500.000	51.500.000	100
5.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	130.000.000	129.850.005	99.88
	- Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	75.000.000	75.000.000	100
	- Pelayanan Sosial Lanjut Usia	55.000.000	54.850.000	99.73
6.	Program Pembinaan Anak Terlantar	60.000.000	60.000.000	100
	- Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	60.000.000	60.000.000	100
7.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	60.000.000	60.000.000	100
	- Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	60.000.000	60.000.000	100
8.	Program Pemeliharaan Areal Pemakaman	80.000.000	59.250.000	74.06
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (TMP)	80.000.000	59.250.000	74.06
10.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	105.125.000	105.125.000	100
	- Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	60.000.000	60.000.000	100
	- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	45.125.000	45.125.000	100
TOTAL BELANJA		1.950.000.000	1.869.005.760	98.37

REALISASI KEUANGAN



PERSENTASE REALISASI KEUANGAN



B. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.562.971.593,- (93.53%) yang diarahkan untuk Gaji dan Tunjangan.

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.869.005.750,- (98.37%) dengan jumlah 9 program dan 25 kegiatan.

3.3 Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

a. Penghargaan Yang Diterima

Penghargaan yang diterima pada tahun 2018(Jika ada)

b. Capaian IKU Tahun 2018-2013

Tabel 2.3 IKU DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE TAHUN 2018-20113

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN AWAL TAHUN 2018	KET
1.	Predikat Evaluasi Sakip dan APIP	Predikat	C	
2.	Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	98,03	
3.	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Program Kesejahteraan Sosial	Persen		

c. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bone tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya yang bersifat insidental yang harus terpenuhi namun sebenarnya bukan sasaran utama pada saat penyusunan anggaran.
2. Sistem koordinasi antara semua stakeholder belum berjalan secara maksimal dan padu antara pihak pelaksana maupun penerima manfaat kegiatan
3. Adanya kondisi yang berbeda ketika berada pada obyek kegiatan/sasaran kegiatan yang justru membutuhkan tambahan biaya diluar dari yang direncanakan.
4. Sarana dan Prasarana pendukung belum berfungsi secara optimal, termasuk SDM, ketersediaan data pendukung yang terkini dan terbaru belum mampu terpenuhi karena keterbatasan dan untuk mensupport pengelolaannya.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan yang lebih detail dan penyedia dana teknis untuk hal-hal yang sifatnya insidental sesuai kondisi yang terus berubah.
2. Mempermantap sistem koordinasi antara semua sektor dan stakeholder yang terkait sehingga program/kegiatan bisa saling beriringan dan berjalan secara terpadu.
3. Melakukan Evaluasi secara detail tentang kondisi yang dianggap akan terjadi supaya sistem penganggaran dapat memenuhi sesuai apa yang telah direncanakan.
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung, kualitas SD, Data Base/Data Dasar yang harus menjadi fokus untuk pencegahan dan dapat disupport dengan ketersediaan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 5 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 1 indikator yang tidak memenuhi kriteria.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone ke depan diantaranya sinkronisasi antara semua dokumen perencanaan sampai dengan dokumen evaluasi kinerja sehingga dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh

instansi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Lampiran-lampiran :

Isi dengan penghargaan yang diterima pada tahun 2018 jika ada

Isi dengan MOU pada tahun 2018 jika ada

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI
KELUARGA MISKIN**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA**



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA

